WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR ……. TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat serta pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab;

b. bahwa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah di Kota Pekalongan telah berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan usaha dan sosial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sehingga perlu adanya pengelompokan kategori pemanfaatan yang mencerminkan tingkat manfaat dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan aset daerah;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika pemanfaatan aset daerah serta perkembangan kebijakan pengelolaan aset daerah dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KATEGORI PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.
15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk masyarakat umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur kategori pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri atas:

a. kategori umum;
b. kategori khusus; dan
c. pemanfaatan tanah ex bengkok.

BAB III

KATEGORI PEMANFAATAN

Pasal 3

(1) Objek penetapan kategori dilaksanakan untuk pemanfaatan:
    a. tanah; dan/atau
    b. bangunan.

(2) Kategori pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai komponen penghitungan dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

(3) Kategori pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kategori umum;

b. kategori khusus; dan

c. emanfaatan tanah ex bengkok.

BAB IV

KATEGORI UMUM

Pasal 4

Kategori umum pemanfaatan tanah dan/atau bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas pemanfaatan untuk:

a. komersil;

b. non Komersil; dan

c. tempat tinggal.

Bagian Kesatu

Komersil

Pasal 5

(1) Pembagian kategori pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. PDAM kategori A;

b. PDAM kategori B;

c. PDAM kategori C;

d. PDAM kategori D;

e. perkantoran, perdagangan, kuliner kategori A; dan

f. perkantoran, perdagangan, kuliner kategori B.

(2) Lokasi yang termasuk dalam PDAM kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komplek Lapangan Sorogenen.

(3) Lokasi yang termasuk dalam PDAM kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. komplek Perumahan Citra Garden;

b. komplek Perumahan Sub Inti;

c. Jalan Asri Perumahan Binagriya;

d. Jalan Karya Bakti; dan

e. komplek Stadion Hoegeng.

(4) Lokasi yang termasuk dalam PDAM kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jalan Jlamprang; dan

b. komplek SMP 4 Bendan Kergon.

(5) Lokasi yang termasuk dalam PDAM kategori D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. komplek Perum Korpri Kandang Panjang;

b. komplek Perum Limas Krapyak; dan

c. Jalan Pantai Sari Panjang Baru.

(6) Lokasi yang termasuk dalam perkantoran, perdagangan, kuliner kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi lokasi yang digunakan untuk perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi dan usaha sejenis.

(7) Lokasi yang termasuk dalam perkantoran, perdagangan, kuliner kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi lokasi yang digunakan untuk usaha perdagangan atau kuliner.

Bagian Kedua

Non Komersil

Pasal 6

(1) Pembagian kategori non komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. sekolah/ponpes/TPQ kategori A;

b. sekolah/ponpes/TPQ kategori B;

c. sekolah/ponpes/TPQ kategori C; dan

d. sekolah/ponpes/TPQ kategori D.

(2) Lokasi yang termasuk dalam sekolah/ponpes/TPQ kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. SMK Dwija Praja;

b. SMK Medika; dan

c. SMK Perikanan Irma.

(3) Lokasi yang termasuk dalam sekolah/ponpes/TPQ kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi TK Kutilang 02.

(4) Lokasi yang termasuk dalam sekolah/ponpes/TPQ kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. SMK Gatra Praja;

b. Yayasan Pendidikan Satyawiguna;

c. SMK Veteran;

d. SMP Salafiyah;

e. PKBM Tondano; dan

f. TPQ Sabda Dua.

(5) Lokasi yang termasuk dalam sekolah/ponpes/TPQ kategori D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. MA Salafiyah;

b. PKBM Bendan Jaya;

c. PKBM Anggrek;

d. TPQ Al Hurriyyah;

e. TK Kutilang 01; dan

f. Pondok Pesantren Al Maliki.

Bagian Ketiga

Tempat Tinggal

Pasal 7

(1) Pembagian kategori tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a. kategori A;

b. kategori B;

c. kategori C;

d. kategori D;

e. kategori E; dan

f. kategori F.

(2) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal Kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan Hayam Wuruk.

(3) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Jalan Urip Sumoharjo; dan

b. Jalan Veteran.

(4) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jalan Jawa; dan

b. Jalan Perintis.

(5) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal Kategori D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jalan Tondano; dan

b. Jalan Sriwijaya.

(6) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal Kategori E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Jalan Karimunjawa;

b. Landungsari (Gang);

c. Jalan Pembangunan;

d. Kauman (Gang);

e. Jalan Merapi;

f. Jalan Muria;

g. Jalan Rinjani; dan

h. Panjang Wetan.

(7) Lokasi yang termasuk dalam tempat tinggal Kategori F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Degayu;

b. Noyontaan (Gang);

c. Poncol Baru;

d. Buaran Kradenan;

e. Jalan Veteran (Gang); dan

f. Jalan Tapak Siring.

BAB V

KATEGORI KHUSUS

Pasal 8

Kategori khusus untuk pemanfaatan tanah dan/atau bangunan pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. SPBU;

b. Bangunan Gedung di lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan; dan

c. menara telekomunikasi/*fiber optic*.

Bagian Kesatu

SPBU

Pasal 9

SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dikenakan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah adalah sebagian tanah milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh SPBU yang berlokasi di Jalan Merdeka Kota Pekalongan.

Bagian Kedua

Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan

Pasal 10

(1) Pembagian kategori Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
    a. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori A;
    b. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori B;
    c. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori C;
    d. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori D;
    e. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori E; dan
    f. Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan kategori F.
(2) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Puskesmas Pembantu Kebulen (Dinas Kesehatan); dan
    b. Puskesmas Pembantu Kuripan Lor 1 (Dinas Kesehatan).
(3) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf b meliputi:
    a. SDN Panjang Wetan 01 (Dinas Pendidikan);
    b. Puskesmas Bendan (Dinas Kesehatan);

c. Puskesmas Dukuh (Dinas Kesehatan);

d. Jalan Muria 12 Bendan (Dinas Kesehatan); dan

e. Puskesmas Jenggot (Dinas Kesehatan).

(4) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. SDN Sapuro 01 (Dinas Pendidikan);

b. SDN Medono 08 (Dinas Pendidikan);

c. SDN Landungsari 01 (Dinas Pendidikan);

d. SDN Dukuh (Dinas Pendidikan);

e. SDN Kradenan 01 (Dinas Pendidikan);

f. Puskesmas Tondano (Dinas Kesehatan);

g. Jalan Tondano No. 5 (Dinas Kesehatan);

h. Puskesmas Klego (Dinas Kesehatan);

i. Puskesmas Pembantu Kradenan (Dinas Kesehatan);

j. Puskesmas Pembantu Gamer (Dinas Kesehatan);

k. Puskesmas Pembantu Dekoro (Dinas Kesehatan); dan

l. Puskesmas Medono (Dinas Kesehatan).

(5) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Keputran Ledok (Dinas Pendidikan);

b. SDN Keputran 06 (Dinas Pendidikan);

c. SDN Landungsari 05 (Dinas Pendidikan);

d. SDN Krapyak Kidul 02 (Dinas Pendidikan);

e. SDN Krapyak Lor 05 (Dinas Pendidikan);

f. SDN Bumirejo (Dinas Pendidikan);

g. Jalan WR Supratman No. 45 (Dinas Kesehatan);

h. Puskesmas Pembantu Slamaran (Dinas Kesehatan);

i. Puskesmas Pembantu Kergon (Dinas Kesehatan);

j. Puskesmas Pembantu Pringlangu (Dinas Kesehatan);

k. Jalan Truntum No. 55 (Dinas Kesehatan);

l. Puskesmas Pembantu Medono Indah (Dinas Kesehatan);

m. Puskesmas Pembantu Kertoharjo (Dinas Kesehatan);

n. Puskesmas Pembantu Pragak (Dinas Kesehatan);

o. Puskesmas Buaran (Dinas Kesehatan);

p. Puskesmas Pembantu Baros (Dinas Kesehatan);

q. Puskesmas Pembantu Bumirejo (Dinas Kesehatan);

r. Puskesmas Pembantu Soko (Dinas Kesehatan); dan

s. Puskesmas Pembantu Sokorejo (Dinas Kesehatan).

(6) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. SDN Pringlangu (Dinas Pendidikan);

b. SDN Kuripan Lor 02 (Dinas Pendidikan);

c. SDN Kandang Panjang 10 (Dinas Pendidikan);

d. SDN Baros (Dinas Pendidikan);

e. SDN Panjang Wetan 04 (Dinas Pendidikan);

f. SDN Kebulen (Dinas Pendidikan);

g. SDN Kramatsari (Dinas Pendidikan);

h. SDN Medono 01 (Dinas Pendidikan);

i. Puskesmas Kusuma Bangsa (Dinas Kesehatan);

j. Puskesmas Pembantu Banyurip Ageng (Dinas Kesehatan);

k. Puskesmas Pembantu Pasirsari (Dinas Kesehatan);

l. Puskesmas Pembantu Karangmalang (Dinas Kesehatan);

m. Puskesmas Pembantu Degayu (Dinas Kesehatan); dan

n. Puskesmas Pembantu Duwet (Dinas Kesehatan).

(7) Lokasi yang termasuk dalam Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan kategori F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. SDN Pabean (Dinas Pendidikan);

b. Puskesmas Pembantu Kalisari (Dinas Kesehatan);

c. Kandang Panjang GG 1D (Dinas Kesehatan);

d. Puskesmas Pembantu Klego Bantaran (Dinas Kesehatan);

e. Puskesmas Pembantu Salam Manis (Dinas Kesehatan); dan

f. Puskesmas Pembantu Bandengan (Dinas Kesehatan).

Bagian Ketiga

Menara Telekomunikasi/*Fiber Optic*

Pasal 11

(1) Pembagian kategori menara telekomunikasi/*fiber optic* sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c terdiri atas:

a. kategori A;

b. kategori B;

c. kategori C;

d. kategori D;

e. kategori E; dan

f. kategori F.

(2) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/*fiber optic* (FO) kategori A sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a adalah Jalan Hayam Wuruk.

(3) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/*fiber optic* (FO) kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Jalan Dr. Cipto;

b. Jalan Gajah Mada;

c. Jalan Hasanudin;

d. Jalan Jendral Sudirman;

e. Jalan Kenanga;

f. Jalan Kh. Wahid Hasyim;

g. Jalan Khm. Mansyur;

h. Jalan Kusuma Bangsa;

i. Jalan Pekalongan;

j. Jalan Pemuda;

k. Jalan Sultan Agung; dan

l. Jalan Teratai.

(4) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/*fiber optic* (FO) Kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jalan Agus Salim;

b. Jalan Angkatan 45;

c. Jalan Bandung;

d. Jalan Blimbing;

e. Jalan Cempaka;

f. Jalan Diponegoro;

g. Jalan Dr. Wahidin;
h. Jalan Hos. Cokroaminoto;
i. Jalan Imam Bonjol;
j. Jalan Jeruk;
k. Jalan Manggis;
l. Jalan Melati;
m. Jalan Patiunus;
n. Jalan Progo;
o. Jalan RA. Kartini;
p. Jalan Salak; dan
q. Jalan Seruni.

(5) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/fiber optic (FO) Kategori D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jalan Asri;
b. Jalan Asri Selatan;
c. Jalan Bahagia;
d. Jalan Bangsawan;
e. Jalan Binagriya;
f. Jalan Binatur;
g. Jalan Cengkeh;
h. Jalan Cita Rasa;
i. Jalan Coklat;
j. Jalan Elok;
k. Jalan Gambir;
l. Jalan Gatot Subroto;
m. Jalan Indah;
n. Jalan Jahe;
o. Jalan Jawa;
p. Jalan Kalimantan;
q. Jalan Kapulogo;
r. Jalan Karet;
s. Jalan Kayu Manis;
t. Jalan Kediri – Jalan Binatur;
u. Jalan Kemakmuran;
v. Jalan Kemiri;
w. Jalan Kh. Ahmad Dahlan;

x. Jalan Kopi;

y. Jalan Kradenan;

z. Jalan Kunir;

aa. Jalan Kurinci;

bb. Jalan Lada;

cc. Jalan Laos;

dd. Jalan Lestari;

ee. Jalan Letjend Suprapto;

ff. Jalan Majapahit;

gg. Jalan Manijau;

hh. Jalan Molek; dan

ii. Jalan Mutiara.

(6) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/*fiber optic* (FO) Kategori E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. banyurip ageng;

b. gg ilalang;

c. griya tirto indah;

d. Jalan ahmad yani;

e. Jalan Anggrek;

f. Jalan barito;

g. Jalan basket;

h. Jalan bola;

i. Jalan brawijaya;

j. Jalan BRD Residence;

k. Jalan budi bhakti;

l. Jalan bulu tangkis;

m. Jalan bumirejo;

n. Jalan dahlia;

o. Jalan danliris;

p. Jalan dharma bakti;

q. Jalan duku;

r. Jalan erlangga;

s. Jalan flamboyan;

t. Jalan futsal;

u. Jalan garuda;

v. Jalan gg jambu;

w. Jalan gg mangga;
x. Jalan graha raya;
y. Jalan griya satria;
z. Jalan h sabrawi;
aa. Jalan irian;
bb. Jalan jayabaya;
cc. Jalan jlamprang;
dd. Jalan kalimantan;
ee. Jalan kapten patimura;
ff. Jalan kartosuro;
gg. Jalan karya bakti;
hh. Jalan kediri;
ii. Jalan kembang manggar;
jj. Jalan kenanga;
kk. Jalan kertanegara;
ll. Jalan ki mangunsarkoro;
mm. Jalan kintamani;
nn. Jalan kradenan;
oo. Jalan kusuma bangsa;
pp. Jalan kutilang;
qq. Jalan lestari;
rr. Jalan manunggal;
ss. Jalan margaret;
tt. Jalan mentari;
uu. Jalan merpati;
vv. Jalan nakula;
ww. Jalan nusantara raya;
xx. Jalan oto iskandar dinata;
yy. Jalan pagaruyung;
zz. Jalan parang puspo;
aaa. Jalan pasundan;
bbb. Jalan patriot;
ccc. Jalan pelita;
ddd. Jalan pramuka;
eee. Jalan rasamalaraya;
fff. Jalan sadewa;

ggg. Jalan samudra pasai;

hhh. Jalan seroja;

iii. Jalan sidomulyo;

jjj. Jalan sikembang;

kkk. Jalan siliwangi;

lll. Jalan singosari;

mmm. Jalan slamaran;

nnn. Jalan sriwijaya;

ooo. Jalan sulawesi;

ppp. Jalan sultan syahrir;

qqq. Jalan sumatra;

rrr. Jalan sunan ampel;

sss. Jalan sunan bonang;

ttt. Jalan sunan drajat;

uuu. Jalan sunan gresik;

vvv. Jalan sunan kalijogo;

www. Jalan supriyadi;

xxx. Jalan tarumanegara;

yyy. Jalan teknopolitan 2;

zzz. Jalan tenis;

aaaa. Jalan tirto indah;

bbbb. Jalan truntum;

cccc. Jalan tumapel;

dddd. Jalan tunas;

eeee. Jalan untung suropati;

ffff. Jalan volly; dan

gggg. Jalan yudha bakti.

(7) Lokasi yang termasuk dalam menara telekomunikasi/*fiber optic* (FO) Kategori F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. Jalan cendrawasih;

b. Jalan dwikora;

c. Jalan kh. hasyim ashari;

d. Jalan khm mansyur gg 6

e. Jalan kurva;

f. Jalan labuan;

g. Jalan limas;

h. Jalan madura;
i. Jalan pantai dewi;
j. Jalan piramida;
k. Jalan prisma;
l. Jalan selat karimata;
m. Jalan selat selayar;
n. Jalan sigma raya;
o. Jalan trapesium; dan
p. Jalan sikembang.

BAB VI

PEMANFAATAN TANAH EX BENGKOK

Pasal 12

Kategori pemanfaatan tanah ex bengkok pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. Pekalongan Selatan;
b. Pekalongan Utara;
c. Pekalongan Barat; dan
d. Pekalongan Timur.

Bagian Kesatu

Pekalongan Selatan

Pasal 13

Pembagian kategori pemanfaatan tanah ex bengkok Pekalongan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

a. Kelurahan Banyurip:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C;
    4. Kategori D;
    5. Kategori E;
    6. Kategori F;
    7. Kategori G; dan
    8. Kategori H.
b. Kelurahan Sokoduwet:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C;
    4. Kategori D;
    5. Kategori E;
    6. Kategori F; dan
    7. Kategori G.
c. Kelurahan Kuripan Yosorejo:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C;
    4. Kategori D;
    5. Kategori E; dan
    6. Kategori F.
d. Kelurahan Jenggot:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B; dan
    3. Kategori C.

e. Kelurahan Kuripan Kertoharjo:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C;
    4. Kategori D;
    5. Kategori E;
    6. Kategori F;
    7. Kategori G;
    8. Kategori H;
    9. Kategori I;
    10. Kategori J; dan
    11. Kategori K.
f. Kelurahan Buaran:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B; dan
    3. Kategori C.

Bagian Kedua

Pekalongan Utara

Pasal 14

Pembagian kategori pemanfaatan tanah ex bengkok Pekalongan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

a. Kelurahan Padukuhan Kraton:
    1. Kategori A; dan
    2. Kategori B.
b. Kelurahan Degayu:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B; dan
    3. Kategori C.
c. Kelurahan Krapyak:
    1. Kategori A; dan
    2. Kategori B.

Bagian Ketiga

Pekalongan Barat

Pasal 15

Pembagian kategori pemanfaatan tanah ex bengkok Pekalongan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:

a. Kelurahan Tirto:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B; dan
    3. Kategori C.
b. Kelurahan Pringrejo:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C; dan
    4. Kategori D.

Bagian Keempat

Pekalongan Timur

Pasal 16

Pembagian kategori pemanfaatan tanah ex bengkok Pekalongan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:

a. Kelurahan Setono:
    1. Kategori A;
    2. Kategori B;
    3. Kategori C;
    4. Kategori D;
    5. Kategori E;
    6. Kategori F;
    7. Kategori G;
    8. Kategori H;
    9. Kategori I;
    10. Kategori J;
    11. Kategori K;
    12. Kategori L;
    13. Kategori M;
    14. Kategori N:
    15. Kategori O; dan

16. Kategori P.

b. Kelurahan Gamer:
   1. Kategori A;
   2. Kategori B;
   3. Kategori C;
   4. Kategori D;
   5. Kategori E;
   6. Kategori F; dan
   7. Kategori G.

c. Kelurahan Klego:
   1. Kategori A; dan
   2. Kategori B.

d. Kelurahan Kalibaros:
   1. Kategori A;
   2. Kategori B;
   3. Kategori C;
   4. Kategori D;
   5. Kategori E;
   6. Kategori F;
   7. Kategori G;
   8. Kategori H; dan
   9. Kategori I.

e. Kelurahan Noyontaansari:
   1. Kategori A;
   2. Kategori B;
   3. Kategori C;
   4. Kategori D; dan
   5. Kategori E.

Pasal 17

Lokasi yang termasuk dalam kategori pemanfaatan tanah ex bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perhitungan dan pemungutan retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2026.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan terdapat objek retribusi baru diluar rincian jalan/lokasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini maka penentuan kategorinya mengacu pada lokasi dengan karakteristik jalan yang sama.

(2) Persetujuan objek retribusi baru dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongaan Tahun 2024 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR XXX TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

Lokasi Yang Termasuk Dalam Kategori Pemanfaatan Tanah Ex Bengkok

NO	KATEGORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I. PEKALONGAN SELATAN			
1. KELURAHAN BANYURIP			
a. EKS KEL. BANYURIP ALIT			
1	KATEGORI A	Banyurip Alit	HP. 28 C. 6 SP. 17/S.I
2	KATEGORI B	Banyurip Alit	-
3	KATEGORI C	Blok 001	HP. 22 C.11 S. 1/S.I
4	KATEGORI C	Blok 001	HP. 8 C.11 S. 2/S.II
5	KATEGORI C	Banyurip Alit(blok 6 No.1)	HP. 24 C. 6 PSP. 13/S.II
6	KATEGORI C	Banyurip Alit	HP. 23 C. 4 SP. 7/S.I
7	KATEGORI C	Banyurip Alit	HP. 25 C. 3 SP.23/S.I
8	KATEGORI C	Banyurip Alit	HP. 11 C. 3 SP. 24/S.I
9	KATEGORI C	Blok. 006	HP. 17 C. 5 SP. 15/S.II
10	KATEGORI D	Blok 010	HP. 27 C. 1 Sh. 58/S.I
11	KATEGORI D	Blok 011	HP. 12 C. 1 Sh. 28/S.II
12	KATEGORI D	Banyurip Alit, (blok 011)	HP. 13 C. 7 SP 54/S.I
13	KATEGORI D	Banyurip Alit	HP. 18 C. 8 SP. 25/S.II
14	KATEGORI D	Blok 011	HP. 16 C. 10 SP. 60/S.II
15	KATEGORI D	Blok 009	HP. 7 C. 1 SH 20/S.I
16	KATEGORI E	Banyurip Alit	HP. 14 C. 8 SP 26/S. I
17	KATEGORI E	Blok 009	HP. 21 C. 2 SP. 18/S.I
18	KATEGORI F	Banyurip Alit	HP. 26 C. 9 SP. 29/S.I
19	KATEGORI F	Banyurip Alit	HP. 19 C. 9 SP. 32/S.II
20	KATEGORI G	Banyurip Alit (blok 006)	HP. 9C. 2SP. 55/II
21	KATEGORI H	Banyurip Alit	HP. 15 C. 2 SP. 60/S.II
b. EKS KEL. BANYURIP AGENG			
1	KATEGORI C	Blok 01	HP. 135 C. 11/S.II
2	KATEGORI C	Blok 5	HP. 102 C. 5 21/S.II
3	KATEGORI C	Blok 5	HP. 102 C. 5 21/S.II
4	KATEGORI C	Blok 22	HP. 128 C. 7 46/S.IV
5	KATEGORI C	Blok 5	HP. 103 C. 8 22/S.II
6	KATEGORI C	Blok 5	HP. 103 C. 8 22/S.II
7	KATEGORI C	Blok 2	HP. 140 C. 3 7/S.III)
8	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP. 137 C. 1 2/S.II

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
9	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP. 137 C. 1 2/S.II
10	KATEGORI C	Blok 2	HP. 138 C. 4 3/S.III
11	KATEGORI C	Blok 24	HP. 143 C. 9 67/S.III
12	KATEGORI C	Blok 24	HP. 143 C. 9 67/S.III
13	KATEGORI C	Blok 01	HP. 131 C. 99/S.II
14	KATEGORI C	Blok 01	HP. 134 C. 44/S.III
15	KATEGORI C	Blok 01	HP.133
16	KATEGORI C	Blok 01	HP. 132 C. 38/S.II
17	KATEGORI C	Blok 01	HP. 130 C. 312/S.II
18	KATEGORI C	Blok 22	HP. 127 C. 8 47/S.IV
19	KATEGORI C	Blok 22	HP. 126 C. 6 48/S.IV
20	KATEGORI C	Blok 02	HP. 136 C. 9 10/S.II
21	KATEGORI C	Blok 020	HP. 112 C. 2 33/S.III
22	KATEGORI C	Blok 020	HP. 113 C. 7 34/S.III
23	KATEGORI C	Blok 020	HP. 114 C. 3 38/S.III
24	KATEGORI C	Blok 020	HP. 125 C. 3 38/S.IV
25	KATEGORI C	Blok 020	HP. 115 C. 143/S.III
26	KATEGORI C	Blok 5	HP. 101 C. 4 25/S.II
27	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.129 C.3 45/S.III
28	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.104 C.4 2/S.II
29	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.139
30	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.110
31	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.111
32	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.141
33	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.142
34	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.108
35	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.106
36	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.105
37	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.109
38	KATEGORI C	Banyurip Ageng	HP.107
2. KELURAHAN SOKODUWET			
a. EKS KEL. SOKO			
1	KATEGORI A	Segeplak	HP. 25 C. 5 27/SIII
2	KATEGORI A	Segeplak	HP. 37 C. 1 37/SII
3	KATEGORI A	Segeplak	HP. 30 C. 1 39/SII
4	KATEGORI A	Segeplak	HP. 21 C. 6 29/SIII
5	KATEGORI A	Segeplak	HP. 24 C. 6 28/SIII
6	KATEGORI A	Segeplak	HP. 23 C. 2 31/SIII
7	KATEGORI A	Segeplak	HP. 31 C. 2 32/SIII
8	KATEGORI B	Dalem	HP. 32 C. 5 58/SII
9	KATEGORI B	Semayid	HP. 28 C. 1 6/SI
10	KATEGORI B	Wonopatran	HP. 38 C. 1 47/SII

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
11	KATEGORI B	Wonopatran	HP. 26 C. 1 48/SII
12	KATEGORI B	Semayid	HP. 35 C. 9 11/SII
13	KATEGORI B	Semayid	HP. 36 C. 3 5/SI
14	KATEGORI C	Soko	-
15	KATEGORI D	Segeplak	HP. 22 C. 5 30/SIII
16	KATEGORI D	Semayid	HP. 29 C. 1 7/SI
17	KATEGORI D	Semayid	C. 1 12/SII
18	KATEGORI D	Semayid	HP. 27 C. 9 18/SII
19	KATEGORI D	Ngelo	C. 11 14/SI
20	KATEGORI D	Semayid	HP. 20 C. 8 2/SII
21	KATEGORI D	Semayid	HP. 19 C. 8 3/SI
22	KATEGORI D	Ngelo. Sijono	C. 10 16/SI
23	KATEGORI D	Desa Sijono	C. 13 18/SII
24	KATEGORI E	Soko	HP.12
25	KATEGORI F	Soko	C. 4 44/SI
b. EKS KEL. DUWET			
1	KATEGORI A	Blok Sejambu	HP. 41 C. 2 23/SIII
2	KATEGORI A	Kulon Kampung	HP. 22 C. 8 41/SIII
3	KATEGORI A	Kulon Kampung	HP. 24 C. 8 42/SII
4	KATEGORI A	Nopatran Blok 5/1	HP.14 C. 1 1/SII
5	KATEGORI A	Pintu Air Soko Blok 5/6	HP. 17 C. 1 7/SII
6	KATEGORI A	Kulon Grungsang Blok 7/1	HP. 45 C. 1 28/SIII
7	KATEGORI A	Kulon Grungsang Blok 8/40	HP. 46 C. 1 29/SIII
8	KATEGORI A	Nopatran Blok 5/5	HP. 14 C. 13 6/SII
9	KATEGORI A	Secepit Blok 6/3	HP. 13 C. 13 4/SIII
10	KATEGORI A	Stempel Blok 7 /1	HP. 42 C. 13 24/SIII
11	KATEGORI A	Stempel Blok 7 /37	HP. 44 C. 13 26/SIII
12	KATEGORI B	Lor Grungsang Blok 4/49	HP. 15 C. 1 13/SIII
13	KATEGORI B	Grungsang Blok 4/46	HP. 48 C. 9 15/SII
14	KATEGORI B	Grungsang Blok 4/47	HP. 47 C. 9 35/SII
15	KATEGORI B	Grungsang Blok 4/48	HP. 43 C. 9 25/SIII
16	KATEGORI B	Grungsang Blok 4/49	HP. 15 C. 14 54/SIII
17	KATEGORI B	Seglendeng	HP. 15 C. 5 97/SI
18	KATEGORI B	Nopatran Blok 5/4	HP. 58 C. 13 5/SII
19	KATEGORI C	Blok Segeblak	HP. 7 C. 2 81/SIII
20	KATEGORI C	Sewatu Blok 9/68	HP. 25 C. 1 57/SI
21	KATEGORI C	Seglendeng	HP. 34 C. 7 98/SII
22	KATEGORI C	Sewaru Blok 7/21	HP. 23 C. 27 62/SII
23	KATEGORI C	Blok 9 No. 66 Kulon Kampung	HP. 29 C. 4 66/SII
24	KATEGORI D	Pintu Air Soko Blok 5/7	HP. 4 C. 1 8/SII

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
25	KATEGORI D	kulon Kayaran Blok 22/27	HP. 40 C. 1 106/SI
26	KATEGORI D	Segeblak Blok Kdl 20/13	HP. 20 C. 1254 86/SII
27	KATEGORI D	Segeblak Blok 20/13	HP. 21 C. 1253 86/SII
28	KATEGORI D	Tunggak Blok 4/27	HP.13 C. 11 20/SII
29	KATEGORI D	Tunggak Blok 4/62	HP.15 C. 11 21/SII
30	KATEGORI D	Duwet	
31	KATEGORI D	Kulon Grungsang Blok 4/47	HP. 56 C. 3 14/SII
32	KATEGORI D	Kulon Grungsang Blok 8/11	HP. 47 C. 3 36/SII
33	KATEGORI D	Sewatu Kidul Blok 3/53	HP. 12 C. 3 46/SII
34	KATEGORI D	Blok Nopatran Soko	HP. 7 C. 15 36/SIII
35	KATEGORI D	Blok Nopatran Soko	HP. 8 C. 15 33/SIII
36	KATEGORI D	Blok Dalem Soko	HP. 6 C. 15 50/SIII
37	KATEGORI D	Blok Semenyit Soko	HP. 10 C. 10 15/SIII
38	KATEGORI D	Blok Semenyit Soko	HP. 9 C. 10 16/SII
39	KATEGORI D	Blok Semenyit Soko	HP. 11 C. 10 17/SII
40	KATEGORI D	Blok Nopatran Soko	HP. 15 C. 10 20/SII
41	KATEGORI D	Blok Nopatran Soko	HP. 14 C. 10 21/SII
42	KATEGORI D	Blok Nopatran Soko	HP. 12 C. 10 24/SIII
43	KATEGORI D	Segeblak Kidul Blok 20/11	HP. 19 C. 15 101/SII
44	KATEGORI D	Seglendeng	HP. 33 C. 7 94/SI
45	KATEGORI D	Sewaru Blok 9/69	HP. 26 C. 27 58/SI
46	KATEGORI D	Kulon Gumuk Blok 17-046	HP. 10 C. 12 73/SII
47	KATEGORI D	Segeblak Blok 19-049	HP. 9 C. 12 74/SII
48	KATEGORI D	Segeblak Kidul Blok 20/5	HP. 52 C. 5 84/SII
49	KATEGORI D	Seglendeng Blok 15/20	HP. 36 C. 5 100/SI
50	KATEGORI D	Dalem Soko	HP. 5 C. 15 51/SIII
51	KATEGORI D	Blok 7 No. 36 Kulon Kampung	HP. 27 C. 4 64/SII
52	KATEGORI D	Blok 9 No. 67 Kulon Kampung	HP. 28 C. 4 65/SII
53	KATEGORI D	Nblok Nopatran Soko	HP. 13 C. 11 23/SIII
54	KATEGORI D	Blok 3 No. 14 Sewatu	HP. 5 C. 3 10/SIII
55	KATEGORI D	Blok 19 No. 1 Segeblak lor	HP. 16 C. 3 76/SIII
56	KATEGORI D	Blok 3 No. 52 /Sewatu	HP. 55 C. 11 47/SIII
57	KATEGORI D	Seglendeng blok 16/77	HP. 31 C. 11 89/SI
58	KATEGORI D	Seglendeng Blok 17/41	HP. 8 C. 12 93/SI
59	KATEGORI D	Kulun BK Muntari	HP. 30 C. 12 92/SII
60	KATEGORI D	Duwet	C. 93 11/SI
61	KATEGORI D	Desa Sijono Blok Nosemi	C. 14 24/SIII
62	KATEGORI G	Blok Segendeng	HP. 6 C. 2 104/SI
3. KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO			

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
a. EKS KEL. KURIPAN LOR			
1	KATEGORI C	Kuripan Lor	C. 1 24/SI
2	KATEGORI D	Duwet	C. 1169/SIII
3	KATEGORI D	Duwet	C. 1170/SIII
4	KATEGORI D	Kuripan Lor	C. 9 46/SII
5	KATEGORI D	Kuripan Lor	C. 8 25/SI
6	KATEGORI D	Duwet	C. 3 67/SIII
7	KATEGORI D	Yosorejo	C. 4 51/SI
8	KATEGORI D	Kuripan Lor	C. 420/SI
9	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 21 C. 2 15/SI
10	KATEGORI D	Yosorejo	C. 480 59/SIII
11	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 17 C. 1 19/SI
12	KATEGORI D	Duwet	C. 1 52/SIII
13	KATEGORI D	Duwet	C. 1 53/SIV
14	KATEGORI D	Yosorejo	C. 144/SIV
15	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 23 C. 5 36/SI
16	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 24 C. 3 37/SI
17	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 12 C. 9 42/SII
18	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 22 C. 7 17/SI
19	KATEGORI D	Kuripan Lor	HP. 11 C. 6 43/S.II
20	KATEGORI D	Kuripan Lor	C. 364/S.II
21	KATEGORI E	Kuripan Lor	HP. 16 C. 12 18/SI
22	KATEGORI F	Kuripan Lor	HP. 25 C. 3 37/S.I
b. EKS KEL. YOSOREJO			
1	KATEGORI A	RW V	HP. 125 C. 5 61/SII
2	KATEGORI A	RW V	HP. 128 C. 4 82/SII
3	KATEGORI A	RW V	HP. 117 C. 7 63/SIII
4	KATEGORI A	RW V	C. 7 49/SIII
5	KATEGORI A	RW V	HP. 124 C. 9 47/SIII
6	KATEGORI A	RW V	HP. 126 C. 10 72/SII
7	KATEGORI A	RW V	HP. 130 C. 1 48/SI
8	KATEGORI A	RW V	HP. 118 C. 2 62/SII
9	KATEGORI A	RW V	HP. 119 C. 3 46/SIII
10	KATEGORI B	RW V	HP. 113 C. 1 60/SII
11	KATEGORI B	RW V	HP. 116 C. 1 48/SIII
12	KATEGORI B	Yosorejo	HP. 127 C. 4 74/SII
13	KATEGORI B	RW V Kuripan Lor	
14	KATEGORI B	Yosorejo	C. 3 59/II
15	KATEGORI B	Soko	C. 4 75/II
4. KELURAHAN JENGGOT			
1	KATEGORI A	Kuripan Kidul	C. 12 26
2	KATEGORI A	Kuripan Kidul	C. 12 68

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
3	KATEGORI A	Kuripan Kidul	C. 12 4
4	KATEGORI A	Yosorejo	C. 11 37
5	KATEGORI A	Yosorejo	C. 11 88
6	KATEGORI B	Yosorejo	C. 15 84
7	KATEGORI B	Kuripan Lor	C. 14 39
8	KATEGORI B	Jenggot	C. 2 52
9	KATEGORI B	Kuripan Kidul	C. 15 9
10	KATEGORI B	Jenggot	C. 1 38
11	KATEGORI B	Yosorejo	C.57 SI.III
12	KATEGORI C	Jenggot	
5. KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO			
a. EKS KEL. KURIPAN KIDUL			
1	KATEGORI C	Blalung	HP. 142 C. 7 31/SII
2	KATEGORI C	Karet Kidul	C. 7 71/SII
3	KATEGORI C	Karet Kidul	C. 7 72/SII
4	KATEGORI G	Blalung	HP. 131 C. 1 34/SI
5	KATEGORI G	Blalung	HP.126 C. 1 16/SII
6	KATEGORI G	Blambangan	HP.140 C. 1712/SII
7	KATEGORI G	Karet	C. 1946/SII
8	KATEGORI H	Karet Kidul	HP.130 C. 7 73/SII
9	KATEGORI H	Karet	HP.147 C. 8 50/SII
10	KATEGORI H	Karet	HP. 122 C. 5 60/SII
11	KATEGORI H	Karet	HP.123 C. 5 61/SII
12	KATEGORI H	Karet	HP.124 C. 5 83/DIV
13	KATEGORI H	Blalung	HP. 141 C. 10 35/SI
14	KATEGORI H	Yosorejo	HP. 143 C. 2 1/SIII
15	KATEGORI H	Karet	HP.148 C. 1180/SI
16	KATEGORI H	Karet	HP. 132 C. 1810/SII
17	KATEGORI H	Karet	HP. 138 C. 20 54/SII
18	KATEGORI H	Karet	C. 21 55/SII
19	KATEGORI H	Karet	C. 22 56/SII
20	KATEGORI H	Karet	HP. 121 C. 6 82/DIV
21	KATEGORI H	Karet	HP. 125 C. 6 59/SII
22	KATEGORI H	Karet	HP.120 C. 6 58/SII
23	KATEGORI H	Blalung	HP.127 C. 2 14/SII
24	KATEGORI I	Karet Kidul	HP. 133 C. 1067/SII
25	KATEGORI I	Blambangan	HP. 134 C. 17 7/SII
26	KATEGORI J	Karet	HP. 135 C. 1 49/SII
27	KATEGORI K	Blambangan	HP. 139 C. 3 23/SI
b. EKS KEL. KERTOHARJO			
1	KATEGORI A	Kertoharjo	HP No. 17 C. 1 14/SII
2	KATEGORI A	Kertoharjo	C. 1 95/SI

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
3	KATEGORI A	Kertoharjo	C. 1 97/SI
4	KATEGORI A	Kertoharjo	
5	KATEGORI B	Kertoharjo	C. 1 76/SII
6	KATEGORI D	Kertoharjo	C. 75/SII
7	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No.34C. 232/SII
8	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No.20C. 230/SII
9	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No.12C. 290/SII
10	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No.3C. 298/SII
11	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No.19C. 229/DII
12	KATEGORI D	Kertoharjo	C. 3 94/SI
13	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No. 13 C. 3 102/SI
14	KATEGORI D	Kertoharjo	C. 1 13/SII
15	KATEGORI D	Kertoharjo	C. 8 78/SII
16	KATEGORI D	Kertoharjo	C. 9 49/SI
17	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No. 8 C. 9 84/SI
18	KATEGORI D	Kertoharjo	HP No. 1 C. 9 88/SI
19	KATEGORI E	Kertoharjo	HP No.14 C. 7 101/SI
20	KATEGORI E	Kertoharjo	C. 7 4/SI
21	KATEGORI E	Kertoharjo	HP No. 10 C. 4 81/SI
22	KATEGORI F	Kertoharjo	HP No. 35C. 433/SII
23	KATEGORI G	Kertoharjo	HP No.9 C. 6 82/SI
6. KELURAHAN BUARAN KRADENAN			
a. EKS KEL. BUARAN			
1	KATEGORI A	Buaran	HP.20 C. 113/SII
2	KATEGORI A	Buaran	HP.08 C. 2 22/SII
3	KATEGORI A	Buaran	HP.06 C. 2 30/SII
4	KATEGORI A	Buaran	HP.04 C. 9 SP.19.I//SII
5	KATEGORI A	Buaran	HP.2A SP.2.I//S.II
6	KATEGORI A	Buaran	HP.15 C. 1 SP.15.I/S/III
7	KATEGORI B	Kuripan Kidul	HP.36
8	KATEGORI B	Duwet	HP.20 60.C.1143
9	KATEGORI B	Banyuurip	HP.10
10	KATEGORI B	Banyuurip	HP.11
11	KATEGORI C	Kuripan Lor	HP.01 47/SII
12	KATEGORI C	Kuripan Lor	HP.02
13	KATEGORI C	Buaran	HP.21
14	KATEGORI C	Banyuurip	HP.12
15	KATEGORI C	Banyuurip	HP.13
II. PEKALONGAN TIMUR			
1. KELURAHAN SETONO			
e. EKS KEL. DEKORO			

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KATEGORI A	Blok Awar 2 (Karang Malang)	HP.67 C. 19 26/SII
2	KATEGORI A	Dekoro	HP.68 C. 19 69/SII
3	KATEGORI B	Blok Selatan Pulau	HP.56 C. 5 93/SI
4	KATEGORI B	Blok Selatan Pulau	HP.05 C. 1 99/SI
5	KATEGORI B	Blok Selatan Pulau	HP.06 C. 1 120/SI
6	KATEGORI B	Blok Pulau	HP. 29 C. 1 87/SI
7	KATEGORI B	Blok Kajen	HP.07 C. 1 45/SI
8	KATEGORI B	Blok Kajen	HP.08 C. 1 46/SI
9	KATEGORI B	Blok Sebacot Utara	HP. 39 C. 10 24/SI
10	KATEGORI B	Blok Sebacot Utara	HP.09 C. 1 27/SI
11	KATEGORI B	Blok Sebacot Utara	HP.11 C. 1 35/SI
12	KATEGORI B	Blok Sebacot Selatan	HP.04 C. 1 28/SI
13	KATEGORI B	Blok Sebacot Selatan	HP.12 C. 1 29/SI
14	KATEGORI B	Blok Sebacot Selatan	HP.10 C. 1 34/SI
15	KATEGORI B	Blok Sebacot Selatan	HP.13 C. 1 33/SI
16	KATEGORI B	Blok Awar 2 (Karang Malang)	HP.72 C. 14 102/SII
17	KATEGORI B	Blok Awar 2 (Karang Malang)	HP.16 C. 14 106/SII
18	KATEGORI B	Blok Selumbung Baros	C. 12 3/SII
19	KATEGORI B	Blok Kajen	HP. 22 C. 3 52/SI
20	KATEGORI B	Blok Awar 2 (Karangmalang)	C. 16 99/SII
21	KATEGORI B	Blok Sebacot	C. 2 16/SI
22	KATEGORI B	Blok Sebacot	HP. 10 C. 2 17/SI
23	KATEGORI B	Blok Sebacot	C. 5 18/SI
24	KATEGORI C	Blok Purboyo (Timur)	HP. 6 C. 5 49/SI
25	KATEGORI C	Blok Sebacot	HP. 38 C. 10 22/SI
26	KATEGORI C	Blok Sebacot	HP. 14 C. 5 19/SI
27	KATEGORI C	Blok Asem Putet Gamer	C. 21 101/SI
28	KATEGORI C	Dekoro	C. 21 84/SII
29	KATEGORI C	Blok Sebacot	C. 9 31/SI
30	KATEGORI C	Blok Pulau	HP. 19 C. 5 116/SI
31	KATEGORI C	Blok Pulau	HP. 34 C. 9 88/SI
32	KATEGORI D	Blok Pulau Selatan	HP. 16 C. 4 97/SI
33	KATEGORI E	Blok Kajen	HP. 23 C. 12 58/SI
34	KATEGORI E	Blok Sebacot	HP. 13 C. 7 36/SI
35	KATEGORI E	Blok Sebacot	C. 7 37/SI
36	KATEGORI E	Blok Sebacot	C. 7 38/SI
37	KATEGORI E	Blok Awar 2 (Karangmalang)	C. 16 76/SII

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
38	KATEGORI E	Blok Awar 2 (Karangmalang)	C. 16 77/SII
39	KATEGORI E	Blok Pulau	C. 2 119/SI
40	KATEGORI F	Blok Kajen	HP. 20 C. 11 42/SIII
41	KATEGORI F	Dekoro	HP. 24 C. 8 55/SIII
42	KATEGORI F	Blok Wadung Tepak (Karangmalang)	C. 18 74/SII
43	KATEGORI F	Blok Wadung Tepak (Karangmalang)	C. 18 11/SII
44	KATEGORI F	Dekoro	C. 18 12/SII
45	KATEGORI F	Dekoro	C. 18 13/SII
46	KATEGORI G	Blok Kajen	HP. 25 C. 2 53/SII
47	KATEGORI G	Blok Kajen	HP. 31 C. 2 54/SII
48	KATEGORI G	Blok Sebacot	C. 11 41/SI
49	KATEGORI G	Blok Sebacot	C. 11 42/SI
50	KATEGORI G	Blok Sebacot	HP. 41 C. 11 43/SI
51	KATEGORI H	Blok Kajen	HP.37 C. 3 51/SII
52	KATEGORI J	Blok Purboyo (Timur)	HP. 8 C. 5 10/SI
53	KATEGORI L	Blok Selatan Pulau	HP.05 C. 5 95/SI
54	KATEGORI M	Blok Kebon Seger Utara Rel	C. 15 138/SIII
55	KATEGORI N	Blok Capit Urang Baros	C. 12 3/SIII
56	KATEGORI N	Blok Kebon Seger Utara Rel	HP.53 C. 15 138/SIII
57	KATEGORI P	Blok Sebacot	HP. 28 C. 9 31/SI
58	KATEGORI P	Blok Kajen	C. 3 52/SII
59	KATEGORI P	Blok Sebacot	HP. 36 C. 7 118/SI
60	KATEGORI P	Blok Sebacot	C. 20 115/SI
61	KATEGORI P	Blok Pulau	HP. 15 C. 6 89/SI
62	KATEGORI P	Blok Pulau	HP. 17 C. 4 91/SI
63	KATEGORI P	Blok Pulau	HP. 18 C. 4 117/SI
f. EKS KEL. KARANG MALANG			
1	KATEGORI B	Karangmalang	HP. 102 C. 5 21/S.II
2	KATEGORI B	Karangmalang	HP. 103 C. 8 22/S.II
3	KATEGORI B	Gamer	HP. 103 C. 8 22/S.II
4	KATEGORI B	Karangmalang	HP. 137 C. 1 2/S.II
5	KATEGORI B	Baros	HP. 143 C. 9 67/S.III
6	KATEGORI B	Karangmalang	HP. 127 C. 8 47/S.IV
7	KATEGORI B	Gamer	HP. 126 C. 648/S.IV
8	KATEGORI C	Karangmalang	HP. 102 C. 5 21/S.II
9	KATEGORI C	Karangmalang	HP. 128 C. 7 46/S.IV
10	KATEGORI C	Karangmalang	HP. 140 C. 3 7/S.III)
11	KATEGORI C	Gamer	HP. 137 C. 1 2/S.II

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
12	KATEGORI C	Gamer	HP. 138 C. 4 3/S.III
13	KATEGORI C	Karangmalang	HP. 130 C. 3 12/S.II
14	KATEGORI I	Karangmalang	HP. 131 C. 9 9/S.II
15	KATEGORI I	Karangmalang	HP. 134 C. 4 4/S.III
16	KATEGORI I	Gamer	HP. 132 C. 3 8/S.II
17	KATEGORI J	Karangmalang	HP.133
18	KATEGORI K	Baros	HP. 136 C. 9 10/S.II
19	KATEGORI O	Gamer	HP. 143 C. 9 67/S.III
2. KELURAHAN GAMER			
1	KATEGORI A	Gamer	HP.54 C. 163/SII
2	KATEGORI A	Gamer	SHM. 74
3	KATEGORI A	Gamer	SHM. 262
4	KATEGORI A	Gamer	SHM. 169
5	KATEGORI A	Gamer	C. 10 55/SI
6	KATEGORI A	Gamer	C. 10 85/SI
7	KATEGORI A	Gamer	C. 10 131/SII
8	KATEGORI A	Gamer	98/SI
9	KATEGORI A	Gamer	HP.49 C. 3 41/SI
10	KATEGORI A	Gamer	HP.40 C. 933/SI
11	KATEGORI A	Gamer	HP.43 C. 413/SI
12	KATEGORI A	Gamer	C. 4 14/SI
13	KATEGORI A	Gamer	C. 4 15/SI
14	KATEGORI A	Gamer	HP.41 C. 4 16/SI
15	KATEGORI A	Gamer	HP.50 C. 4 42/SI
16	KATEGORI A	Gamer	HP.49 C. 4 44/SI
17	KATEGORI A	Gamer	HP. 16 C. 1 67/SII
18	KATEGORI A	Gamer	HP.17 C. 1 68/SII
19	KATEGORI A	Gamer	HP. 64 C. 1 74/SII
20	KATEGORI B	Gamer	C. 10 28/SI
21	KATEGORI B	Gamer	C. 10 40/SI
22	KATEGORI B	Gamer	C. 10 100/SI
23	KATEGORI B	Gamer	HP.65 C. 3 73/SIII
24	KATEGORI B	Gamer	HP.55C. 434/SI
25	KATEGORI C	Gamer	C. 8 60/SIII
26	KATEGORI C	Gamer	C. 8 96/SI
27	KATEGORI C	Gamer	C. 8 104/SII
28	KATEGORI C	Gamer	HP.70 C. 8 110/SII
29	KATEGORI D	Gamer	HP.22 C. 1 7/SI
30	KATEGORI D	Gamer	HP.23 C. 1 9/SI
31	KATEGORI D	Gamer	HP.53 C. 1 10/SI
32	KATEGORI D	Gamer	HP.19 C. 1 20/SI
33	KATEGORI D	Gamer	C. 1 35/SI

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
34	KATEGORI D	Gamer	HP.74 & 73 C. 1 71/SII
35	KATEGORI E	Gamer	HP.51 C. 6 72/SII
36	KATEGORI E	Gamer	HP.33 C. 6 87/SI
37	KATEGORI F	Gamer	HP.35 C. 2 117/SIII
38	KATEGORI F	Gamer	HP.47 C. 2 152/SIII
39	KATEGORI G	Gamer	HP. 72 C. 5 77/SII
40	KATEGORI G	Gamer	HP. 62 C. 5 78/SIII
41	KATEGORI G	Gamer	HP.37 C. 5 102/SII
3. KELURAHAN KALI BAROS			
a. EKS KEL. SOKOREJO			
1	KATEGORI A	Sokorejo Blok 5	HP.44 C. 9 47/SI
2	KATEGORI A	Blok 3	HP.17 C. 9 38/SII
3	KATEGORI A	Sokorejo Blok 18	HP.32 C. 8 65/SIII
4	KATEGORI A	Sokorejo Blok 5	HP. 22 C. 1 44/SI
5	KATEGORI A	Sokorejo	
6	KATEGORI A	Blok 3	HP.26
7	KATEGORI A	Blok 15	C. 6 33/SII
8	KATEGORI A	Blok 15	HP.42 C. 2 80/SII
9	KATEGORI A	Sokorejo	
10	KATEGORI A	Sokorejo Blok 17	C. 7 24/SIII
11	KATEGORI A	Sokorejo	HP. 40 C. 942/SI
12	KATEGORI A	Sokorejo	C. 7 58/SII
13	KATEGORI A	Sokorejo	
14	KATEGORI A	Sokorejo	
15	KATEGORI B	Blok 5	HP. 43 C. 9 41
16	KATEGORI B	Sokorejo Blok 17	C. 1 75/SII
17	KATEGORI B	Sokorejo	46/SII
18	KATEGORI B	Sokorejo	C. 1227 68/SII
19	KATEGORI B	Sokorejo	
20	KATEGORI B	Blok 15	C. 4 48/SII
21	KATEGORI B	Blok 16	C. 2 31/SII
22	KATEGORI B	Sokorejo	
23	KATEGORI B	Sokorejo	
24	KATEGORI G	Sokorejo	
b. EKS KEL. BAROS			
1	KATEGORI A	Pintu Setapan Barat	
2	KATEGORI A	Pintu Setapan Timur	
3	KATEGORI B	Baros	
4	KATEGORI B	Baros	
5	KATEGORI B	Turi Baros	C. 3 55/SII
6	KATEGORI B	Capit Urang	HP. 74
7	KATEGORI B	Serondo	

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
8	KATEGORI B	Baros	C. 4 20/SI
9	KATEGORI C	Baros	C. 40 83/SII
10	KATEGORI C	Baros	C. 41 88/SII
11	KATEGORI C	Baros	C. 43 98/SII
12	KATEGORI D	Siwaru Baros	C. 2 18/SI
13	KATEGORI D	Baros	
14	KATEGORI D	Baros	C. 6 90/SII
15	KATEGORI D	Baros	C. 6 96/SII
16	KATEGORI D	Gamer	C. 6 65/SII
17	KATEGORI D	Gamer	HP. 60 C. 6 87/SII
18	KATEGORI E	Gayam Batok	C. 10 70/SII
19	KATEGORI E	Pintu Air	37/SII
20	KATEGORI F	Gayam Batok	68/SII
21	KATEGORI F	Siwaru Baros	C. 8 9/SI
22	KATEGORI F	Siwaru Baros	C. 8 19/SII
23	KATEGORI F	Siwaru Baros	C. 8 58/SII
24	KATEGORI F	Siwaru Baros	C. 10 106/SII
25	KATEGORI F	Baros	C. 5 105/SI
26	KATEGORI F	Baros	HP. 70 C. 5 109/SII
27	KATEGORI H	gayam batok	C. 7 53/SI
28	KATEGORI H	Turi Baros	C. 2 57/SII
29	KATEGORI H	Baros	
30	KATEGORI H	Baros	
31	KATEGORI H	Siwaru Baros	C. 10 29/SI
32	KATEGORI I	Baros	
4. KELURAHAN NOYONTAANSARI			
a. EKS KEL. LANDUNGSARI			
1	KATEGORI B	Sokorejo	
2	KATEGORI C	Yosorejo	
3	KATEGORI D	Yosorejo	
4	KATEGORI E	Yosorejo	HP.112 C. 20 81 SP II
b. EKS KEL. NOYONTAAN			
1	KATEGORI A	Yosorejo	C. 157 Persil 30 / III
5. KELURAHAN KLEGO			
1	KATEGORI A	Klego	
2	KATEGORI B	Klego	C. 9
III. PEKALONGAN BARAT			
1. KELURAHAN TIRTO			
1	KATEGORI A	Tirto	
2	KATEGORI B	Sebelah Makam, Blok 29	HP. 138 C. 1 84.C/S.III
3	KATEGORI B	Sebelah Makam, Blok 29	HP. 141 C. 1 84.C/S.III

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
4	KATEGORI B	Sebelah Makam, Blok 29	HP. 139 C. 1 84.C/S.III
5	KATEGORI B	Sebelah Makam, Blok 29	HP. 140 C. 1 84.C/S.III
6	KATEGORI C	Jalan Supriyadi Timur Jalan	HP. 125 C. 8 PL.86/S.III
2. KELURAHAN PRINGREJO			
a. EKS KEL. PRINGLANGU			
1	KATEGORI A	RT 05/02 Barat Rel	HP. 33 C. 1 45/S.II
2	KATEGORI A	RT 5/2 Barat Rel	HP. 31 C. 1 19/S.II
3	KATEGORI A	RT 5/2 Barat Rel	HP. 32 C. 1 44/SII
4	KATEGORI A	RT. 05 RW. 02	HP. 40 C. 1 52/SII
5	KATEGORI A	RT.4/3	HP. 23 C. 3 40/S.I
6	KATEGORI A	RT.4/3	HP. 24 C. 3 41/S.I
7	KATEGORI A	RT 5/2 Sblh selatan lele	HP. 34 C. 2 27/S.II
8	KATEGORI A	RT 4/3 Timur Rel	HP. 38 C. 2 51/SII
9	KATEGORI B	Buaran	C.450 38/S.I
10	KATEGORI D	Kuripan Kidul	HP. 5 C. 63 13/SII
b. EKS.KEL. BUMIREJO			
1	KATEGORI B	RT 1 RW 1	HP. 113 C. 1 44/SII
2	KATEGORI C	Bumirejo	HP. 134 C. 5 45/SI
c. EKS KEL. TEGALREJO			
1	KATEGORI A	RT 02 RW VIII	HP. 1 C. 7 Sp47/S.II
2	KATEGORI A	Tegalrejo	HP. 14 C. 7 Sp47/S.II
IV. PEKALONGAN UTARA			
1. KELURAHAN PADUKUHAN KRATON			
a. EKS KEL. PABEAN			
1	KATEGORI A	Baros	
2	KATEGORI B	Kel. Baros, Timur Jalan	HP. 13
3	KATEGORI B	Kel. Baros, Timur Jalan	HP. 12
4	KATEGORI B	Kel. Baros, Barat Jalan	HP. 7
5	KATEGORI B	Kel. Baros, Barat Jalan	HP. 8
6	KATEGORI B	Kel. Baros, Barat Jalan	HP. 9
7	KATEGORI B	Kel. Baros, Barat Jalan	HP. 10
8	KATEGORI B	Kel. Baros, Barat Jalan	HP. 11
2. KELURAHAN DEGAYU			
1	KATEGORI A	Degayu	
2	KATEGORI B	Kebon	C. 1 9
3	KATEGORI C	Sekenteng Karangmalang	C. 2 7
3. KELURAHAN KRAPYAK			
a. EKS KEL. KRAPYAK LOR			
1	KATEGORI B	Krapyak Lor	
2	KATEGORI B	Krapyak Lor	
3	KATEGORI B	Krapyak Lor	

NO	GORI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
4	KATEGORI B	Krapyak Lor	
	b. EKS KEL. KRAPYAK KIDUL		
1	KATEGORI A	Krapyak Kidul	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diperlukan integrasi evaluasi kinerja pembangunan daerah dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa dengan adanya perubahan siklus pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026, maka ketentuan mengenai perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan kinerja organisasi perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertujuan untuk mendorong setiap individu ASN agar berkinerja dalam rangka mencapai target kinerja organisasi.

(2) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.

(3) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur setiap triwulan.

(4) Kinerja organisasi triwulanan akan menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja melalui penghitungan capaian kinerja sub kegiatan dengan ketentuan:

a. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 1 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan April, Mei dan Juni pada tahun berkenaan;
b. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 2 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Juli, Agustus dan September pada tahun berkenaan;
c. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 3 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Oktober, November dan Desember pada tahun berkenaan; dan
d. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 4 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Januari, Februari dan Maret pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal ...

.....

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk semua serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, perlu adanya pengaturan terkait sistem penerimaan Murid baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa agar penerimaan Murid baru di Kota Pekalongan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tidak diskriminatif, perlu menyusun aturan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut Satuan PAUD dapat berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak, Raudhotul Athfal, Bustanul Athfal, dan satuan PAUD sejenis.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang berdasarkan agama Islam;
15. Panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya;
16. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
17. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
18. SPMB dalam jaringan yang selanjutnya disebut SPMB daring adalah Sistem SPMB di mana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi, pengumuman, daftar ulang, dan penetapan calon Murid cadangan dilakukan secara *real time* berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.
19. SPMB luar jaringan yang selanjutnya disebut SPMB luring adalah Sistem SPMB yang proses pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
20. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya

pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

21. Jalur Domisili adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
22. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon Murid penyandang disabilitas, anak panti, dan anak putus Satuan Pendidikan.
23. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
24. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
25. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar.
26. Daya Tampung Satuan Pendidikan adalah jumlah Murid baru yang dapat diterima di Satuan Pendidikan.
27. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan dengan batasan jumlah maksimal Murid tertentu.
28. Rapor adalah dokumen laporan hasil belajar yang menyajikan pencapaian kompetensi murid secara objektif, mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan.
29. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.

Bagian Satu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman Satuan Pendidikan dalam SPMB;
b. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
c. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
d. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
e. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan SPMB yaitu:
a. objektif;
b. transparan;
c. akuntabel;
d. berkeadilan; dan
e. tidak diskriminatif.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur SPMB untuk jenjang:
a. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yaitu TK; dan
b. Pendidikan Dasar meliputi SD dan SMP.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. penerimaan Murid baru;
b. penerimaan Murid pindahan;
c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II
PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) SPMB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
(2) Dalam pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan dibentuk panitia di setiap Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Pendidikan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan saran/masukan dari Komite Satuan Pendidikan.
(4) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
(5) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Kedua
Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 7

(1) Penerimaan Murid baru jenjang SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur, terdiri atas:
    a. Jalur Domisili;
    b. Jalur Afirmasi; dan
    c. Jalur Mutasi.
(2) Penerimaan Murid baru jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, terdiri atas:
    a. Jalur Domisili;
    b. Jalur Afirmasi;
    c. Jalur Mutasi; dan
    d. Jalur Prestasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

(1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.
(2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. persyaratan umum; dan
    b. persyaratan khusus.

Paragraf 2
Persyaratan umum

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. batas usia; dan/atau
b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berusia minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

(1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan minimal berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Calon Murid berusia minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
(3) Ketentuan usia minimal 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
    a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
    b. kesiapan psikis.
(4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
(5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
(6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi sesuai dengan domisili calon Murid.
(2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 3
Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

(1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
(2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
(3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
    a. meninggal dunia;
    b. bercerai; atau
    c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
(4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
(5) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan tempat tinggal.
(6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. bencana alam; dan/atau
    b. bencana sosial.
(7) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon Murid.
(8) Surat keterangan tempat tinggal memuat keterangan mengenai:
    a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
    b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
(2) Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
    b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
    c. Kartu Keluarga baru akibat hilang atau rusak;
    d. Perubahan elemen data lain yang ada di Kartu Keluarga kecuali perubahan alamat.
(3) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
    a. kartu keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
    b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
(4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon Murid.

Pasal 18

(1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus terdata dalam keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(3) Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
(4) Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
    a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
    b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
(5) Jalur Afirmasi bagi anak panti harus terdata pada database anak binaan panti yang ada di Dinas Sosial.
(6) Jalur Afirmasi bagi anak tidak sekolah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Pasal 19

(1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. prestasi akademik; dan/atau
    b. prestasi nonakademik.
(3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
    a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
    b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
(4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
    a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
    b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya;
(5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
    a. Dinas Pendidikan; atau
    b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
(7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
    a. calon Murid;
    b. penyelenggara lomba;
    c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
    d. pihak lain yang berkepentingan.
(8) Selain menggunakan prestasi yang tersebut pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
    a. rapor dari Satuan Pendidikan asal;
    b. sertifikat/piagam prestasi;
    c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa; dan/atau
    d. dokumen lain terkait prestasi.
(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21

(1) Dinas Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
    a. rapor;
    b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
    c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
    d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).
(3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 22

(1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
    a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
    b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
    a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
    b. kartu keluarga.
(3) Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Keempat
Perencanaan Penerimaan Murid baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:
a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;

b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
c. penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah;
d. pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
e. penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
f. sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 24

(1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
(2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
    a. sebaran Satuan Pendidikan;
    b. sebaran domisili calon Murid; dan
    c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
(3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup seluruh wilayah Kota Pekalongan dan beberapa kelurahan atau desa yang berbatasan langsung dengan Satuan Pendidikan.
(4) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
(2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
    a. kondisi geografis; dan
    b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten atau kota.

Pasal 26

(1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
(2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan kabupaten atau kota; dan
d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
   1. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
   2. penyandang disabilitas.

Pasal 27

(1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan:
   a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
   b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
   c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
(2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
(3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
   a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
   b. jumlah lulusan SD/sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.
(4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
(6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(7) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
   a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
   b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
    a. hasil penghitungan daya tampung; dan
    b. penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
(2) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 3
Penentuan persentase Daya Tampung
Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
    a. Jalur Domisili;
    b. Jalur Afirmasi;
    c. Jalur Prestasi; dan
    d. Jalur Mutasi.
(2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
    a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
    b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
    a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
    b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
(5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD, dan SMP.

Pasal 30

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 31

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 4
Penyusunan Petunjuk Teknis
Penerimaan Murid Baru

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.
(2) Penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan paling sedikit unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat.
(3) Petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. persyaratan penerimaan Murid baru;
    b. kriteria jalur penerimaan Murid baru;
    c. daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
    d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
    e. mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
    f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
    g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
    h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
(4) Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Pasal 33

(1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
   a. panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
   b. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan
(2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh kepala daerah.
(3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Dukcapil;
   c. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d. Dinas Komunikasi dan Informasi.
(4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
(5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
(6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 6
Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.
(2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:
   a. jaringan listrik;
   b. jaringan internet;
   c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
   d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
(3) Pemerintah Daerah harus memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. disajikan secara faktual; dan
   b. terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
      1. Aplikasi Dapodik;
      2. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
      3. data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
      4. data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Paragraf 7
Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 35

(1) Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan Murid baru paling sedikit kepada:
   a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
   b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
   c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
   d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
   e. kelompok kerja pengawas Satuan Pendidikan;
   f. kantor kementerian agama; dan
   g. orang tua/wali calon Murid.

(2) Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan Murid baru paling sedikit kepada:
   a. orang tua/wali calon Murid; dan
   b. calon Murid.

(3) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
   a. bimbingan teknis;
   b. pertemuan komite Satuan Pendidikan;
   c. forum kepala Satuan Pendidikan;
   d. forum organisasi pendidikan;
   e. penyampaian surat;
   f. media sosial milik Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan;
   g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
   h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
   i. media massa setempat; dan/atau
   j. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

(1) Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru terdiri atas:
   a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
   b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
   c. seleksi penerimaan Murid baru;
   d. pengumuman penerimaan Murid baru; dan
   e. daftar ulang.

(2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud padaa ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 37

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
    a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
    b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru minimal memuat informasi:
    a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
    b. tanggal pendaftaran;
    c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
    d. jumlah ketersediaan daya tampung;
    e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
    f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru
Pasal 38

(1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring dan/atau luring.
(2) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan.
(3) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
(4) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
    a. akses laman penerimaan Murid baru;
    b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
    c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.

(5) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(6) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
(7) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Paragraf 4
Seleksi Penerimaan Murid Baru
Pasal 39

(1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c berdasarkan dokumen persyaratan yang:
    a. Diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); atau
    b. Diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (6).
(2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 40

(1) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
(2) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.

Pasal 41

(1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
    a. Usia; dan
    b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
(2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas;

a. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
b. Usia.

Pasal 42

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan satuan Pendidikan.

Pasal 43

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas;
a. Hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan
b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 44

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 45

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan atau Jalur Prestasi.

Pasal 46

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili dan Jalur Afirmasi.

Pasal 47

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili dan Jalur Prestasi.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 48

(1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
(2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
(3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d.
(4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) ke Satuan Pendidikan negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
(2) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan negeri.
(2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pembebasan biaya pendidikan; atau
    b. pengurangan biaya pendidikan.
(3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
(4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 51

(1) Daftar ulang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
(4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima di Satuan Pendidikan.
(5) Calon Murid cadangan diambil dari kelebihan calon Murid pendaftar yang tidak terjurnal di Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB *online*.
(6) Calon Murid cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan diambil secara berurutan sesuai jalur.
(7) Dalam hal calon murid cadangan dari jalur yang sesuai tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), kuota dialihkan ke jalur domisili.
(8) Calon Murid cadangan melakukan pendaftaran ulang secara *online* setelah pelaksanaan daftar ulang Murid baru yang dinyatakan telah diterima.
(9) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
    a. tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
    b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
    c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Keenam
Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 52

(1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
    a. identitas Murid;
    b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
    c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
(2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 53

(1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
(2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
    a. jumlah daya tamping yang tersedia dan diumumkan;
    b. jadwal pelaksanaan;
    c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
    d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
    e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
    f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
    g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
    h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
    i. pemutakhiran data Murid.
(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu Pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
(4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
    a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
    b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
    c. petunjuk teknis di daerah;
    d. jadwal pelaksanaan;
    e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
    f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
    g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
    h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
    i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
    j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penganganan/penyelesaian;
    k. pemutakhiran data Murid; dan
    l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Bagian Ketujuh
Biaya

Pasal 54

Biaya pelaksanaan kegiatan SPMB dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan.

Bagian Kedelapan
Larangan Dan Pelanggaran

Pasal 55

(1) Satuan Pendidikan negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak boleh memungut biaya pelaksanaan SPMB dari calon Murid.
(2) Satuan Pendidikan dilarang melakukan tindakan jual beli/titipan Murid/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Setiap orang atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan SPMB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Murid atau orang tua/wali Murid yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses SPMB, dinyatakan ditolak atau tidak diterima dalam pendaftaran SPMB dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 57

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 58

(1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
(2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
(3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
    a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
    b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 59

(1) Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan dengan syarat:
   a. atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal, persetujuan kepala Satuan Pendidikan yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/Kota asal; dan
   b. jumlah peserta didik Satuan Pendidikan yang dituju tidak melebihi kuota daya tampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 60

(1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kota Pekalongan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang dituju.

(2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Kota Pekalongan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
   b. menyerahkan surat pernyataan dari Satuan Pendidikan asal; dan
   c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 61

(1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
   b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur Pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 62

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan;
a. penerimaan Murid baru; dan
b. penerimaan Murid pindahan,
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

(1) Dinas Pendidikan melakukan Pembinaan SPMB kepada Satuan Pendidikan.
(2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 66

(1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau review sesuai dengan kewenangan.
(3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
(4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 67

(1) Satuan Pendidikan mengikutsertakan komite Satuan Pendidikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
(2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan dan melaporkan kepada Wali Kota.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
   b. hasil pemantauan dan pengawasan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7A Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID